

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mewirausahakan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Data tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki intensitas yang tinggi di 3 karakteristik kewirausahaan publik yaitu:

No.	Karakteristik Kewirausahaan Publik	Presentase adanya Karakteristik Kewirausahaan Publik
1	Memanfaatkan peluang	95,9 %
2	Melakukan inovasi	90 %
3	Memiliki otonomi atau kebebasan/freedom atau diskresi untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan keputusan	64 %  (Otonomi yang dimiliki hanya di ruang lingkup masing-masing bidang)
4	Pengambilan Resiko	19 %

Jadi, dari tabel di atas terlihat karakteristik kewirausahaan yang paling menonjol adalah memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi. Selain itu untuk karakteristik kewirausahaan publik yaitu otonomi dalam pembuatan keputusan sangat lemah dikarenakan otonomi yang dimiliki hanya di masing-masing bidang tersebut. Sehingga membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berani mengambil resiko, dikarenakan otonomi yang dimiliki hanya sebatas ruang lingkup bidangnya.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa untuk karakteristik kewirausahaan publik yaitu pengambilan resiko, sebanyak 81% organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang tidak memiliki karakteristik tersebut. Padahal menurut Barnier dan Hafsi<sup>122</sup> mengatakan bahwa karakteristik mendasar dari wirausaha publik adalah perilaku yang proaktif, inovatif dan berani mengambil resiko. Tetapi karakteristik kewirausahaan publik yaitu resiko tidak dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tidak memiliki karakteristik kewirausahaan publik yaitu, pengambilan resiko. Tetapi, Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki usaha untuk memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi berdasarkan dari temuan yang diperoleh peneliti.

Jadi, dapat disimpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki sebagian karakteristik kewirausahaan publik, yaitu memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi. Karakteristik kewirausahaan publik yang dimiliki

---

<sup>122</sup> Barnier dan Hafsi, *Op.Cit.*,489-492.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tersebut dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memanfaatkan peluang dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi hal ini dapat membuat akses dan fasilitas pelayanan meningkat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki inovasi dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi hal ini dapat meningkatkan komunikasi, dan akses dan fasilitas yang meningkat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki otonomi yang rendah sehingga membuat daya tanggap juga rendah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan otonomi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya sebatas di ruang lingkup bidangnya saja.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tidak memiliki pengambilan resiko sehingga keandalan dan biaya juga rendah. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kebebasan yang diberikan atasan dalam mengambil keputusan. Sehingga kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu perlunya untuk mewirauahakan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan penciptaan nilai-nilai publik.

## 7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan peneliti dalam mewirausahakan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk lebih lagi memahami mengenai UU 23 tahun 2014 dimana Undang-Undang tersebut dapat melindungi aparatur sipil negara dalam melakukan perubahan.
2. Dengan adanya UU 23 tahun 2014 tersebut, maka diharapkan para kepala bidang bisa lebih berani mengambil resiko dalam hal melakukan inovasi
3. Perlu adanya pemberian wewenang yang lebih kepada kepala bidang dalam kordior yang tidak melanggar UU No.23 Tahun 2014.
4. Perlu adanya nilai-nilai kewirausahaan publik agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena nilai-nilai tersebut dapat memacu organisasi untuk melakukan suatu perubahan dalam memperbaiki organisasi.
5. Perlu adanya keterlibatan masyarakat yang nyata dalam membuat suatu program, sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam membuat suatu program.
6. Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan ketetapan yang jelas dalam hal waktu khususnya untuk memperoleh pelayanan.
7. Perlu adanya kesadaran kepala bidang untuk cepat tanggap terhadap respon maupun keluhan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barnier dan Hafsi, *The Changing Nature Of Public Entrepreneurship*. Public Administration Riview.2007.
- Bellone,J,Carl.&Frederick,George.Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy.Hayward: California State University Vol. 52, No, 2.1992.
- Casson,Mark.*The Entrepreneur: An Economic Theory*.Oxford:Martin Robinson,1982.
- Creswell,W,John.“Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”, University of Nebraska-Lincoln: Sage Publications, Inc.2013.
- Currie,G dkk. *Entrepreneurial Leadership In The English Public Sector: Paradox Or Possibility?*.Coventry: University of Warwick.2008.
- E,Lewis.*Public Entrepreneurship Toward A Theory Of Bureaucratic Polititcal Power*.Bloomington:Indiana University Press.1980.
- Gay, Rumbel, Lorraine. Diehl,L,P *Research Methods for Business and Management*, New York: Mac Millan Publishing Company,1992.
- Hackman.J, dan Oldham.G, *Work Redesign*, Reading, Addison-Wesley: 1980.
- Hirschman and Doering, *Shifting Involvements: Private Interest And Public Action*.Princeton: Princeton University Press.1982.

- J,A,Rohr. *To Run A Constitution: The Legitimacy Of The Administrative State*.Lawrence:University Press Of Kansas.1986.
- Knight.Risk, Uncertainty And Profit.Boston: Houghton Mifflin.1921.
- Larry,D,Terry.Leadership Of Public Bureaucracies: The Administrator As Conservator, 2nd edition.Routledge.2015.
- Merriam,B,Sharan.*Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*.San Fransisco: Jossey-Bass, 2009.
- Moleong, J,Lexy.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999.
- Moleong,J,Lexy.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya,2004.
- Morris,H,M. dan ,Jone,F,F.*Entrepreneurship In Established Organizations: The Case Of The Public Sector*.*Entrepreneurship Theory & Praticce,1,Fall*.1999.
- Morris,H,M. Kuratko,D,F. dan Covin,C,J.*Covin,Corporate Entrepreneurship And Innovation: Entrepreneurial Develoment Within Organizatons*,(Mason,OH:Thomas/South Western,2008.
- Nawawi,Hadari. dan Martini,Hadari. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1992.
- Osborne and Gaebler.Reinventing government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector.New York: Addison-Wesley Publishing Company,Inc.1992.

Ostrom, Elinor. *Unlocking Public Entrepreneurship and Public Economies*. Helsinki: EGDI. 2005.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. LikiSPelangi Aksara. 2007.

Poerwandari, Kristi, E. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998.

Schmidt, Faye and Strickland, Teresa. *Citizen-Centred Service Network Canadian Centre For Management Development*. Canadian : Centre For Management Development. 1998.

Schneider et al, *Public Entrepreneurs: Agents For Change In American Government*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), 8-147.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.

Sitorus, Monang. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

### **Jurnal Akademis**

C, Kearney. and F, Roche. F. *Facilitating*. "Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model". *Journal Of Enterprising Culture*, (2007): 277.

G, R, Holcombcafe. *Political Entrepreneurship And The Democratic Allocation Of Economic Resources*. *The Review Of Austrian Economics*. 2002.

Mulyono, Fransisca. "Inovasi di Sektor Publik". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5, No.2(2008):133.

Roberts, Nancy. "Public Entrepreneurship And Innovation," *Review Of Policy Research*, Vol.11, No.1(1992):56.

Suryanto, Adi. dan Sutopo. "Pelayanan Prima Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan iii". Lembaga Administrasi Negara: Jakarta, (2006):15.

Yanto, Niode. *Implementasi Entrepreneurial Government Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Pengalaman Empiris)*.

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyesuaian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Internet**

'Buruknya Pelayanan Publik Bukti Reformasi Birokrasi Gagal'.

<https://m.tempo.co/read/news/2010/11/03/078289050/buruknya-pelayanan-publik-bukti-reformasi-birokrasi-gagal> (14.04. 2016 ).



